



UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
(Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara)				
Pengembang RPS	Koordinator RMK		Koordinator Prodi	
Program Studi: Hukum Tata Negara			Muhammad Idzhar, Lc., M.H.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	<ol style="list-style-type: none"> Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai praktisi hukum Islam dan Hukum Tata Negara (Siyasah) Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan tanggungjawab (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan dibidang praktisi hukum Islam secara umum dan bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) secara mandiri; Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan dalam bidang hukum Islam secara umum dan bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) 		
	CP-MK	(capaian mata kuliah) <ol style="list-style-type: none"> Mampu memberikan pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Secara Umum. Mampu memahami Kedudukan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam sisitem Hukum Di Indonesia Mampu memahami aspek-aspek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan konsep konsep serta bentuk sebuah Sengketa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Mampu memahami teori teori Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, 		
Diskripsi Singkat MK	Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam program pendidikan di Fakultas Syariah, Mata kuliah pilihan bagian ini berkonsentrasi secara khusus pada bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Materi muatan dalam mata kuliah ini meliputi dua gelombang seri perkuliahan dalam satu semester yang utuh. Pada gelombang pertama pengertian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, asas hukum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang umum, dismissal Proses HAPTUN, Obyek HAPTUN, dan standar/tolok ukur pembuktian dalam HAPTUN. Pada gelombang berikutnya materi muatan kulaih meliputi upaya upaya hukujm dalam sebuah HAPTUN			

Dosen pengampu	
Matakuliah syarat	

Mg Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Materi/ Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria dan Indikator Penilaian	Bobot Nilai (%)	Referensi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami dan mematuhi kontrak yang telah disepakati bersama	Kontrak Belajar dan pengenalan materi	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu memahami dan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati dalam kelas	Mahasiswa memiliki adab dan tata krama yang baik selama kegiatan belajar mengajar	10 Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
2	mahasiswa mampu atau mengerti secara umum tentang ruang lingkup hukum acara peradilan tata usaha negara yg meliputi pengertian asas dan kopetensi.	Sejarah hukum acara peradilan tata usaha negara Persetujuan Perjanjian Kontrak	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	Mahasiswa memiliki kemampuan dalam hal menjelaskan tentang konsep dasar hukum acara peradilan tata usaha negara	5 Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

								Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
3	mahasiswa dapat mengerti tentang sejarah pengaturan PTUN di Indonesia	lahirnya sampai pada pengertian Hukum Administrasi Negara diperluas dalam menjangkau tindakan aparatur negara	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	Mahasiswa memiliki pemahaman landasan hukum yang kuat tentang hukum acara peradilan tata usaha negara	5	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
4	mahasiswa memiliki kemampuan untuk mempertajam pemahaman pada kopertensi Absolut dan kopetensi relative pada hukum acara peradilan tata usaha negara	mampu membedakan kopetensi absolut dan kopetensi relatif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	mahasiswa dapat memisahkan batasan-batasan kewenangan peradilan tata usaha negara	5	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

								Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
5	mahasiswa memiliki kemampuan dalam membuat kuasa dalam Hukum acara peradilan tata usaha negara	susunannya dan kedudukan hukum pemohon	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	mahasiswa mampu menganalisa secara formal syarat kuasa dalam peradilan tata usaha negara	5	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
6	mahasiswa dapat memahami obyek dan subyek PTUN	syarat syarat subyek hukum	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	mahasiswa dapat mengurai produk pemerintah yg terkategori sebagai keputusan (beschikking) dengan peraturan (regeling)		Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

								Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
7	mahasiswa dapat memiliki sebuah kemampuan yang koperenship tentang Dismissal Proses	sifat peradilan tata usaha negara yang aktif dalam sebuah proses permohonan gugatan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	kerangka formal sesuai standar peradilan tata usaha negara	10	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH,FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
8	mahasiswa mampu memahami tahapan teknis dalam membuat Replik (jawaban tas eksepsi/tangkisan serta jawaban Termohon	susunan pemohon dalam jawaban terhadap eksepsi termohon	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	mahasiswa dapat memberikan sebuah metodologi atau tehnik dalam membuat dalil semakin kuat	5	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH,FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

								<p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;</p>
9	Ujian Tengah Semester							
10	<p>mahasiswa mampu memahami tahapan teknis dalam membuat Duplik (jawaban atas eksepsi/tanggisan serta jawaban Termohon</p>	<p>dalil dalil yang disusun telah sesuai dengan Hukum Acara PTUN</p>	<p>Ceramah, diskusi dan tanya jawab</p> <p>Tugas Makalah</p> <p>Pemecahan Kasus</p>	<p>Tatap Muka 100 Menit</p> <p>Terstruktur 140 Menit</p> <p>Mandiri 100 Menit</p>	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh</p>	<p>mahasiswa dapat memberikan sebuah analisis tentang susunan dalil Duplik yang baik dan benar</p>	10	<p>Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta.</p> <p>Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH,FHUP: Jakarta.</p> <p>La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda.</p> <p>Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;</p>
11	<p>mahasiswa memiliki kemampuan untuk unsur unsur yang di buktikan dalam</p>	<p>Kesimpulan atau ringkasan keseluruhan fakta yang ada dalam persidangan</p>	<p>Ceramah, diskusi dan tanya jawab</p> <p>Tugas Makalah</p>	<p>Tatap Muka 100 Menit</p>	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh</p>	<p>mahasiswa dapat menilai dan membuat susunan dalam PTUN</p>	5	<p>Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta.</p> <p>Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH,FHUP: Jakarta.</p> <p>La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda.</p>

	peradilan tata usaha negara		Pemecahan Kasus	Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit				Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
12	mahasiswa memiliki kemampuan dalam membuat ringkasan sebuah atau kesimpulan di dalam PTUN	a. Cara berakhirnya b. Pembayaran c. Novasi d. Kompensasi e. Pencampuran hutang f. Pembebasan hutang g. Kebatalan atau pembatalan kontrak h. Kesepakatan kedua belah pihak	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	mahasiswa memiliki sebuah kemampuan dasar dalam hal dalam menilai berakhirnya kontrak	10	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
13	mahasiswa memiliki pemahaman tentang upaya	perlawanan banding kasasi PK	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Tatap Muka 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan	mahasiswa dapat menjelaskan tentang tahapan dalam melakukan	5	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta.

	hukum dalam PTUN		Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	pemahaman yang di sertai contoh	upaya hukum di PTUN		La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
14	mahasiswa dapat menjelaskan proses eksekusi dalam PTUN	putusan dan pelaksanaan putusan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Tatap Muka 100 Menit Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang di sertai contoh	mahasiswa dapat memberikan sebuah cara menjalankan rangkaian dalam sebuah putusan PTUN	10	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta. Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
15	mahasiswa dapat memberikan penjelasan	1. pangkal sengketa alasan gugatan perkara penilaian penyalagunaan	Ceramah, diskusi dan tanya jawab	Tatap Muka 100 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan dan	mahasiswa dapat membuat sebuah analogi tentang fiktif negative	10	Zairin Harahap, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Rajawali Pers: Yogyakarta.

	tentang penyelesaian sengketa TUN Pasca UUAP	wewenang Permohonan KTUN	Tugas Makalah Pemecahan Kasus	Terstruktur 140 Menit Mandiri 100 Menit	memberikan pemahaman yang di sertai contoh	dan fiktif positif	Endra Wijaya, 2011, Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PKIH, FHUP: Jakarta. La Sina, 2017, Hukum Tata Usaha Negara, Kreasi Total Media, Samarinda. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
16	Ujian Akhir Semester						

<p>Diverifikasi Koord Prodi Hukum Tata Usaha Negara</p> <p>M. Pd</p>  	<p>Divalidasi UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah</p> <p>M.Pd</p> 
--	--